

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA  
EKONOMI PEREMPUAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

---

**Takwim**

**Dosen Universitas Lakidende**

**(Naskah diterima: 10 Juni 2018, disetujui 26 Juli 2018)**

***Abstract***

*This study aims to find out and analyze: The Effectiveness of the Implementation of Women's Economic Development Program at Women's Empowerment, Child Protection, Population and Family Planning in Southeast Sulawesi Province The method used is qualitative research with descriptive analysis. The data obtained comes from interviews, observations and document studies. The results showed that the Effectiveness of the Implementation of Women's Economic Development Program, the Women's Empowerment Agency, Child Protection, Population and Family Planning in Southeast Sulawesi Province has been implemented in accordance with established procedures, but not yet optimal.*

**Keywords:** *Effectiveness of the Implementation of Women's Economic Development Program at the Agency for Women's Empowerment, Child Protection, Population and Family Planning in Southeast Sulawesi Province*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Ekonomi Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Sulawesi Tenggara Metode yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan analisis deskriptif. Data yang diperoleh berasal dari wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Ekonomi Perempuan, ada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, namun belum optimal.

**Kata Kunci:** Efektifitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Ekonomi Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Sulawesi Tenggara.

## **I. PENDAHULUAN**

Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tahap perkembangan yang makin pesat dan mengglobal.

Sebagai salah satu bangsa yang sedang berkembang, bangsa Indonesia sedang giat-giatnya mengejar ketertinggalannya di segala bidang. Salah satu upaya untuk mengejar ketertinggalannya yaitu salah satunya dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi dan industri. Dalam rangka menghadapi era globalisasi yang mengandalkan kemajuan industri, yang tujuan utamanya mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menempatkan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional pada masa periode pemerintahan sekarang ini, dilakukan dengan mengembangkan perekonomian rakyat yang didukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja

yang memadai, mendorong meningkatnya pendapatan. Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari : (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor masyarakat sehingga mengurangi tingkat kemiskinan dan lain-lain.

Dari berbagai sumber sering didengar dan juga dapat dijumpai hal-hal umum yang sering terjadi dalam kebanyakan UMKM di Indonesia, yaitu manajemen usaha yang lebih bersifat perorangan dan melibatkan keluarga, dan kerabat dekat, sehingga usaha yang berakta notaris dilaporkan hanya 1,7% saja, selain itu adanya akses industri kecil terhadap lembaga kredit formal yang rendah, keterbatasan dan kesulitan dalam pengadaan bahan baku pada UMKM yang berorientasi ekspor, lemahnya kompetensi pada sumber daya manusia serta banyak hal lainnya.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah terbukti mampu hidup dan berkembang

di dalam badai krisis selama lebih dari enam tahun, sektor ini pada kenyataannya mampu menunjukkan kinerja yang lebih tangguh dalam menghadapi masa kritis. Dalam rangka Pengembangan Usaha Ekonomi Perempuan dalam pembangunan, khususnya Ibu Rumah Tangga kurang mampu yang memiliki usaha, pemerintah melaksanakan beberapa kebijakan antara lain adalah Program Pengembangan Usaha Ekonomi Perempuan dimana salah satu kegiatannya adalah Memfasilitasi Pelaku Usaha Ekonomi Perempuan dalam memperoleh akses permodalan dengan Lembaga Keuangan atau Pihak Perbankan. Salah satu Kelompok Sasaran dari kebijakan atau program Pengembangan Usaha Ekonomi Perempuan yang dicanangkan Pemerintah selama ini melalui Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.

Kependudukan dan KB Prov. Sultra adalah Kaum Perempuan yang menjadi Pelaku Usaha Ekonomi yang kurang mendapatkan kesempatan dalam memperoleh akses permodalan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan perempuan ibu rumah tangga dalam melakukan kegiatan usaha ekonomi guna mendapatkan tambahan penghasilan keluarga dan dapat ikut serta berperan dalam kegiatan

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan menggunakan data pada tahun 2016.

### **2.1 Metode dan Jenis Penelitian**

Metode penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif.

### **2.2 Teknik Pemilihan Informan**

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan Proses Pendekatan Dengan Subyek Penelitian, Informan dalam penelitian ini terdiri dari : (1) Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (Kabid. PKHP), (2) Kepala Sub Bidang Ekonomi, (3) 3 (Tiga) Orang Pendamping Pelaku Usaha Ekonomi Perempuan, (4) Kepala Bagian Perkreditan BRI Kantor Cabang Kendari, (5) 3 (Tiga) Orang Pelaku Usaha Ekonomi Perempuan yang di Bina di Kota Kendari.

### **2.3 Fokus Penelitian**

Penelitian berfokus pada; Program Pelaku Usaha Ekonomi Perempuan, Efektivitas Program, serta Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Program Pengembangan Usaha Ekonomi Perempuan.

### **2.4 Sumber Data**

Dalam penelitian ini meliputi; Data Primer yang berasal dari para informan secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara yang berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Usaha Ekonomi Perempuan pada BP3AKKB Prov. Sultra. Pencarian data dipusatkan pada informasi yang berkaitan dengan focus penelitian ini mengenai, pemahaman mereka tentang proses pemberdayaan masyarakat, serta Data Sekunder yang menyangkut studi dokumen, pada Kantor – Kantor Pemerintah, Instansi yang terkait, jurnal penelitian, majalah, surat kabar dan buku teks. Data sekunder itu meliputi berbagai hal, antara lain keadaan geografis dan demografis, keadaan social ekonomi dan budaya daerah penelitian.

### **2.5 Teknik Pengumpulan**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi ;Observasi pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang

diteliti.n Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian, Wawancara (interview). Dengan menggunakan Teknik Analisis Data mennggunak tiga komponen utama dalam proses analisis data yakni : (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga proses analisis data tersebut berperan penting dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.

## **III.HASIL PENELITIAN**

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tehnis Daerah Sulawesi Tenggaraadalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari Nomor 1, Kompleks Bumi Praja, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.

### **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PEREMPUAN**

#### **❖ Pendataan Pelaku**

Kegiatan Pendataan Pelaku dimaksudkan untuk mengidentifikasi Pelaku Usaha Mikro Perempuan dengan cara melakukan kunjungan lapangan ke tempat masyarakat pedagang Usaha mikro sering berjualan. Kunjungan tersebut selain sosialisasi secara langsung dengan mendatangi satu persatu para pedagang, juga mewawancarai pedagang mikro berkaitan dengan berapa lama usaha yang dijalankan, modal usaha yang digunakan selama ini bersumber dari mana, sudah atau belum pernah mendapatkan bantuan modal usaha dan alamat tempat tinggal. Seluruh rangkaian wawancara oleh petugas lapangan peruntukannya sebagai proses bagi pedagang usaha mikro tersebut bisa menjadi mitra binaan oleh Badan Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan hasil wawancara informan Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan selaku Sekretaris Pelaksana Kegiatan dan Narasumber dalam Kegiatan Pelatihan mengemukakan bahwa

“ Karakteristik atau kriteria Pelaku Usaha Ekonomi Perempuan yaitu (a) Ibu Rumah Tangga atau Perempuan Pedagang kurang mampu yang membutuhkan dana usaha, (b) Memiliki Usaha, (c) Tidak memiliki pinjaman dari bank lain atau koperasi simpan pinjam, dan (d) Berdomisili menetap”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa Program Pengembangan Kapasitas Usaha Ekonomi Perempuan, yaitu dilakukan berdasarkan kelompok yang tersebar di Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk Pelaku Usaha Ekonomi Perempuan yang telah mengikuti Program Pengembangan Kapasitas Usaha Ekonomi Perempuan berupa Pendataan Pelaku Usaha Ekonomi Perempuan dan mengikuti Pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten atau Kota dapat dilihat pada Tabel 1. sebagai berikut :

Tabel.1 Pelaku Usaha Ekonomi Perempuan  
di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengikuti Pelatihan.

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaku			Jumlah
		Penjual Ikan	Penjual Sayur	Penjual Makanan	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Kota Kendari	96	73	81	250
2.	Kota Baubau	35	23	42	100
3.	Kab. Konawe	48	79	83	210
4.	Kab. Kolaka	59	66	85	210
5.	Kab. Kolaka Timur	31	62	57	150
6.	Kab. Kolaka Utara	23	58	69	150
7.	Kab. Bombana	41	43	66	150
8.	Kab. Muna	106	36	68	210
9.	Kab. Buton	48	23	29	100
10.	Kab. Buton Utara	56	36	58	150
11.	Kab. Wakatobi	42	24	34	100
	<b>Jumlah</b>	<b>585</b>	<b>523</b>	<b>672</b>	<b>1780</b>

Sumber : BP3AKKB Prov. Sultra Tahun 2016

Dari Tabel 1 tersebut terlihat bahwa terdapat klasifikasi jenis Pelaku Usaha Ekonomi Perempuan yang terdapat di beberapa Kabupaten / Kota antara lain Penjual Ikan, Penjual Sayur dan Penjual Makanan. Pada tabel tersebut dapat juga dilihat jumlah

#### ❖ Pelatihan dan Pembinaan

Program Pengembangan Kapasitas Usaha Ekonomi Perempuan dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan Pengetahuan dan Informasi mengenai kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pihak Perbankan dalam hal ini Bank BRI guna memberikan

persebaran Pelaku Usaha Ekonomi Perempuan di beberapa Kabupaten / Kota relatif tidak sama atau relatif berbeda. Faktor pembeda pada jenis usaha satunya karena factor wilayah yang dihuni.

akses permodalan bagi Pelaku Usaha Ekonomi Perempuan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Metode Pelatihan dari Program Pengembangan Usaha Ekonomi Perempuan ini adalah metode Penjelasan atau pemberian Materi antara lain Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota terhadap Pengembangan Usaha Ekonomi

Perempuan, Pelatihan Manajemen Pemasaran Usaha, Pembuatan Kerajinan Tangan berdasarkan sumber daya alam yang tersedia dan penjelasan teknis dalam memperoleh Bantuan Modal Usaha pada Bank BRI serta Pengisian Pembukuan Praktis guna manajemen keuangan usaha.

Pelatihan pada Program ini dilaksanakan pada Kabupaten / Kota se Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Prov. Sultra.

Pembinaan yang dilakukan dalam Program Pengembangan Kapasitas Usaha Ekonomi Perempuan adalah melalui Tim Terpadu yang terdiri dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM dan Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI. Masing – masing Anggota Tim memberikan informasi dan juga memberikan penjelasan teknis berdasarkan tupoksi masing – masing.

#### ❖ **Pendampingan**

Pendampingan dilakukan sebagai upaya untuk memfasilitasi para Pelaku Usaha Ekonomi Perempuan usaha mikro dalam hal pengurusan

mulai dari memenuhi kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan persyaratan sampai dengan pencairan dana bantuan dan pelunasannya. Pendampingan juga dilakukan agar dapat memberikan informasi kepada para Pelaku Usaha Ekonomi Perempuan mengenai mekanisme atau penyaluran Bantuan Modal Usaha.

#### ❖ **Pelaksana Kebijakan**

##### • **Tim Pendamping**

Tugas utama dari Tim Pendamping adalah melakukan pendataan para Pelaku Usaha Ekonomi Perempuan yang berhak mengikuti Program dan memenuhi persyaratan dalam memperoleh modal usaha dari perbankan. Tim Pendamping juga bertugas mendampingi Pelaku Usaha Ekonomi Perempuan dalam proses percaian dana sampai kepada proses pengembalian pinjaman kepada pihak bank

##### • **Tim Fasilitator**

Tugas dari Tim Fasilitator yaitu memberikan informasi kepada para pelaku usaha ekonomi perempuan pada saat mengikuti pelatihan dan pembinaan. Informasi yang di berikan mengenai program atau kebijakan pemerintah daerah, proses penyaluran kredit usaha mikro, manajemen usaha dan sampai kepada pembukuan praktis dalam pengelolaan keuangan

❖ **Aspek Tujuan Program**

Penentuan tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya nanti terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Namun demikian, banyak individu atau organisasi yang salah kaprah dalam menentukan tujuan dengan cara membuat beberapa tujuan dalam sebuah perencanaan. Hal ini tentu akan membingungkan dan berakibat kurang maksimalnya hasil yang bisa dicapai.

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, ketika diwawancarai oleh Peneliti tentang Bagaimana Tujuan Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Ekonomi Perempuan, mengemukakan bahwa :

“ Tujuan pada program ini adalah untuk memberikan informasi kepada para Pelaku Usaha Ekonomi Perempuan di Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Program Pengembangan Kapasitas Usaha Ekonomi Perempuan, dimana fokus dari pada kegiatan ini adalah membina dan mendampingi para pelaku usaha ekonomi dalam meningkatkan kapasitas usahanya. Selain itu, memberikan informasi dan pengetahuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan yang berada

di ibukota provinsi dan yang berada di Kabupaten atau Kota.

puan dan Keluarga Berencana Kabupaten atau Kota mengenai Tehnis Pelaksanaan Program ini guna mensinergikan program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota. “

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat diketahui bawah Tujuan yang dilakukan pada program ini kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dari pihak perbankan.

❖ **Fungsi Manajemen**

Tujuan Program yang diharapkan akan terwujud dengan baik apabila fungsi manajemen dapat dipahami dan dikelola dengan baik pula oleh para pelaksana teknis kegiatan yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh para pelaksana yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Fungsi Manajemen Program harus dilaksanakan oleh Pelaksana Tehnis kegiatan untuk mengetahui Tujuan dari Program yang akan dilaksanakan. Sebuah kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila para Pelaksana



dapat melaksanakan manajemen program dengan baik pula.

Berdasarkan proses penelitian baik itu dari segi wawancara maupun dalam bentuk dokumen – dokumen bahwa penyampaian dari program ini sudah jelas.

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Ekonomi ketika di wawancarai tentang fungsi manajemen dalam pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Ekonomi Perempuan, mengemukakan bahwa :

“ Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Ekonomi Perempuan ini, kami sebagai aparat pelaksana tidak mengalami kesulitan yang cukup berarti. Itu semua didukung oleh sumber daya manusia aparat pelaksana kegiatan yang berkualitas dan mempunyai pemahaman yang baik terhadap tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program ini. Program ini telah dicanangkan sejak tahun 2011 dan mulai dilaksanakan sejak tahun 2012 jadi semua staf pelaksana sudah memahami dengan baik tugas masing-masing. (Wawancara 2016). Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tujuan pada program ini telah dipahami dengan jelas kepada aparat pelaksana melalui petunjuk teknis dan kepada para pedagang mikro melalui sosialisasi yang dilakukan sejak

awal pengumpulan data oleh petugas lapangan. Menurut informan, Program Pengembangan Usaha Ekonomi Perempuan sudah dilaksanakan pada 11 Kabupaten / Kota se Sulawesi Tenggara.

#### ❖ Aspek Sasaran

Mengacu pada Pendapat Sedarmayanti, Sasaran meliputi 2 komponen yaitu : Program lebih spesifik dan Terukur serta jangka waktu yang lebih efisien. Sasaran disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program.

##### a. Program lebih Spesifik

Program Pengembangan Usaha Ekonomi Perempuan merupakan indikator kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam menumbuhkan perekonomian Bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah wajib menyelaraskan atau mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah pusat dengan cara mengklasifikasikan kebijakan pemerintah yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

##### b. Jangka Waktu Lebih Efisien

Selain dari segi Pelaksanaan Program yang lebih Spesifik dan Terukur, salah satu

indikator penentuan sasaran program juga adalah Jangka Waktu Pelaksanaan yang lebih Efisien. Berkaitan dengan indikator jangka waktu pelaksanaan kegiatan, Tim Pelaksana Kegiatan dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Prov. Sultra bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten atau Kota membentuk tim terpadu guna pelaksanaan program di daerah tidak tumpang tindih.

#### ❖ Aspek Target

Kebijakan atau Program yang di keluarkan oleh pemerintah merupakan salah satu ciri dari suatu kepemimpinan yang nantinya kebijakan atau program tersebut dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau yang biasa di sebut RPJMD. Selanjutnya dari berbagai macam program kegiatan yang masuk dalam dokumen RPJMD, akan diseleksi lagi program dan kegiatan yang strategis untuk menjadi kegiatan prioritas dilaksanakan.

##### a. Pemahaman Pengelola dalam Program

Terkait dengan pemahaman pelaksana tentang Program Pelaku Usaha Ekonomi Perempuan, salah satu pendamping I menyatakan bahwa :

Program ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, walaupun dengan dukungan dana yang tersedia melalui Bank Rakyat Indonesia, namun masyarakat dalam hal ini perempuan pelaku usaha ekonomi banyak yang memanfaatkan bantuan Bantuan modal usaha tersebut karena selain memperoleh kemudahan Bantuan Modal Usaha juga ada pendampingan dalam proses pengurusan di Bank. (Wawancara 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaksana terhadap program ini sangat jelas, karena program ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat sekarang. Jadi para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan program tersebut.

##### b. Komitmen Pengelola Dalam Melaksanakan Program

Hasil penelitian terhadap respon para pelaksana, para informan memberikan pernyataan yang hamper sama. Adapun pernyataan pendamping II, mengemukakan sebagai berikut :

Untuk menjalankan program ini tentu saja kita wajib berkomitmen demi keberhasilan terlaksanya program ini. Kami selaku pelaksana harus saling mendukung dalam

program ini. Kita sebagai aparat pemerintah harus selalu mendampingi untuk memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh bantuan modal usaha agar dapat meningkatkan usaha mereka serta membantu ekonomi keluarga. (Wawancara Mei 2016)

Penyataan informan tersebut menunjukkan sikap dari aparat pengelola program yang memiliki komitmen tinggi dalam menempatkan kebijakan sebagai prioritas program dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, lebih lagi menyangkut kepentingan pelayanan masyarakat.

❖ **Aspek Hasil yang dicapai**

- a. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 58 Tahun 2004 tentang Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan.
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- c. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/08/BPPKB/2011 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pelaku Usaha Ekonomi Perempuan.

**IV. KESIMPULAN**

Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Ekonomi Perempuan Pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang telah ditetapkan namun masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan dari Pengambil Kebijakan seperti keterbatasan dana dan anggaran yang dialokasikan guna mendukung pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Usaha Ekonomi Perempuan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya Melakukan Pengembangan Kapasitas Usaha Ekonomi Perempuan di lihat dari aspek tujuan sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Mulai dari fungsi perencanaan sampai kepada fungsi manajemen pelaksanaan kegiatan. Sedangkan dari aspek sasaran, Program Pengembangan Usaha Ekonomi Perempuan sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan. Hal ini ditandai dengan jumlah peserta dan jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Perempuan yang menjadi binaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Dilihat dari aspek target, Program Pengembangan Usaha Ekonomi

Perempuan yang dilak-sanakan pada 11 Kabupaten atau Kota sudah optimal berdasarkan target yang direncanakan. Selain itu dari segi jumlah peserta yang hadir mengikuti kegiatan serta jumlah peserta yang mengajukan berkas pada Bank BRI juga merupakan salah satu indikator Hasil yang dicapai pada pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Ekonomi Perempuan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, Solichin, 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Jakarta ; Bumi Aksara.
- Campbell. 1989. *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Erlangga
- Effendy, Onong Uchjana. 1989. *KAMUS KOMUNIKASI*. Bandung : PT. Mandar Maju
- Gie,The Liang. 1998. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, T. H. 1993, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Liberty, Yogyakarta
- Harsono, Hanifah. 2002. Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta ; PT. Mandala Satu.
- Hasibuan.M. 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Gunung Agung, Jakarta
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: PEMBARUAN.
- Miles, M.B., dan A.M. Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press Jakarta.
- Moekijat, 1989. *Administrasi Kantor*. Bandung ; Alumni.
- Pamudji, 1994. *Profesionalisme Aparatur Negara dalam Meningkatkan Pelayanan dan Perilaku Politik Publik*. Jakarta: Widya Praja.Rachmadi, F. 1994. *Public Relations dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : PT. Gramedia
- Soeprihanto. J. 1990, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bharata Karya Aksara, Jakarta
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Setiawan Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanto, Astrid S. 1975. *Pendapat Umum*.Bandung:Bina Cipta.
- S.P. Siagian. 1979. *Manajemen*, Yogyakarta: Liberty.
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta
- Steers, M Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.